

Menilai Keberangkatan Outbond Anggota DPRD Ke Bali

Tidak ada alasan lain keberangkatan kegiatan **Outbond** anggota DPRD ke Denpasar Bali, kecuali hanya untuk menghambur-hamburkan anggaran yang notabennya adalah uang rakyat Riau. Kalau manfaatnya untuk individu Anggota DPRD barangkali ia, karena disediakan dana Rp. 1.474.650.000,- dari APBD pergi berjalan-jalan secara gratis ke Bali.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh anggota DPRD, kami menilai kegiatan ini dipaksakan sebagai pengganti kegiatan DPRD ke Luar Negeri. Sehingga mereka (DPRD) menyiasati kegiatan dengan memasukkan pada APBD Perubahan dengan bentuk kegiatan **Outbond**. Padahal anggaran kegiatan ini tidak dirancang pada APBD murni 2012.

Pertanyaanya, apakah kegiatan ini diperlukan jika di dibandingkan dengan kinerja Anggota DPRD Riau priode ini. Kalau dilihat dari anggaran 2012 pos sekretarat DPRD Riau, untuk peningkatan kapasitas aparatur dianggarkan Rp. 7.076.125.200,-. Dengan rincian :

- Kegiatan Study komperatif : Rp. 286.280.000
- Wokrshop pembinaan Anggota DPRD ; Rp. 1.233.795.000
- Bimtek :Rp. 3.303.000.000
- Pelatihan Kesekretariatan :Rp. 733.399.400
- Penghargaan :Rp. 45.000.000
- Outbond :Rp. 1.474.650.000

Belum lagi ditambah anggaran yang juga masih untuk kepentingan aparatur (DPRD/dan Pegawai. Nah, sudah banyak kegiatan rutin tahun bimbingan teknis dan lain-lain untuk DPRD namun mereka masih tega menggunakan uanga rakyat untuk plesiran ke Bali.

Anggaran lebih dari Rp1,4 Milyar itu jika dibagi dengan 60 orang yang ikut pergi, maka jatah perorang dianggarkan lebih dari Rp, 23 Juta. Jelas anggaran tersebut tidak masuk akal untuk keberangkatan selama 2 hari.

Selian itu, kegiatan ini juga menyebabkan terbengkalainya pembahasan KUA PPAS sehingga mengakibatkan tidak efektif pembahasan RAPBD Riau 2013. Kemudian plesiran ke Bali pada saat pembahasan RAPBD, bisa jadi sebagai ajang untuk melakukan dil-dil anggaran antara DPRD dengan satuan kerja.

Waspada Perjokian SPPD

Keberangkatan, Anggota DPRD ke bali kali ini merupakan bentuk pembangkangan serta tidak mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Kenyataanya mereka masih ngotot untuk pergi plesiran tanpa berfikir ulang atas agenda-agenda yang telah dibuat.

Selain itu, keberangkatan plesiran DPRD ke Bali yang tidak semua anggota dprd ikut berangkat, maka diindikasikan akan terjadi praktek-praktek perjokian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Baik itu dilakukan oleh pegawai sekretariat DPRD atau kompromisasi antara Anggota DPRD dan Staf Sekretariat. Kenapa, perlu diketahui bahwa laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, masih banyak ditemukan anggaran perjalanan dinas fiktif atau tidak bisa dipertanggung jawabkan. Selain anggaran perjalanan fiktif ini terjadi di SKPD pemprov, Parkatek perjokian SPPD itu juga terjadi di sekretariat DPRD Riau.

“Praktek ini, bisa saja terjadi akibat kompromisasi antara anggota dprd dengan pegawai sekretariat DPRD, dengan demikian anggaran tetap dicairkan meski mereka tidak berangkat. Kemudian, praktek ini bisa dilakukan oleh sekretariat DPRD tanpa sepengetahuan anggota DPRD”.

Oleh karena itu, diharapkan kepada lembaga audit agar lebih jeli melihat persoalan perjokian ini, karena dimungkikankan praktek-praktek ini akan terjadi. Selain itu, anggota DPRD yang tidak berangkat untuk menghamburkan-hamburkan uang agar lebih waspada terhadap anggaran yang sifatnya *lunsum* (anggaran habis pakai) ini.

Kami dari Fitra Riau akan terus mengawasi penggunaan anggaran – anggaran yang secara langsung berdampak merugikan rakyat.